

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Ghofur Anshori, dan Yulkarnanin Harahab, *Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*, Total media, Jakarta, 2008.
- Adami chazaqi, “*Pelajaran hukum pidana*”, PT Rajagrafindo Persada: Malang, 2001.
- Adami chazaqi, “*Pelajaran hukum pidana*”, PT Rajagrafindo Persada: Malang, 2001.
- Ahmad Hanafi, *Azas-Azas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: PT Bulan Bintang, 1986.
- Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Azas Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*. Penerbit Rangkang Education Yogyakarta & Pukap Indonesia, Yogyakarta, 2012.
- Andi Hamzah I, *Pembaharuan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Andi Hamzah. *Sistem Pidana Dan Pemidanaan Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1993.
- Andi Muhammad Sofyan dan Abd Asis, *Hukum Acara Pidana*, (Prenadamedia Group, Jakarta, 2014.
- Aristo M.A. Pangaribuan dkk, *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Rajawali; Pers Jakarta, 2017.
- BPKP, PSP: *Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Khusus atas Kasus Penyimpangan yang Berindikasikan Merugikan Keuangan/Kekayaan Negara dan/atau Perekonomian Negara*, Juni 1996
- Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013.
- Chazami Adami, *Hukum Pidana Materil Dan Formil Korupsi Di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang, 2014.

- D.Y Witanto, *Dimensi Kerugian Negara Dalam Hubungan Kontraktual*, CV. Mandar Maju, Cetakan pertama, Bandung, 2012.
- Djazuli, *Fiqih Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1947.
- Edi Yunara, *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005).
- Egi Sudjana, *Republik Tanpa KPK Koruptor Harus Mati*, JP Books, Surabaya, 2008.
- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Firdaus, Ilham, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and Ni Made Sukaryati Karma. "Praperadilan Penetapan Status Tersangka Dalam Dugaan Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Analogi Hukum* 2.3 (2020): 366-371.
- Hamzah, Andi, *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, Gramedia, Jakarta, 1991.
- Harry Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Perkara Pidana*, Bandar Maju, Bandung, 2003.
- Harun M.Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990.
- Hernold Ferry Makawimbang, *Kerugian Keuangan Negara*, Thafa Media, Yogyakarta, 2014.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, diterbitkan oleh Departemen P & K, Balai Pustaka, Jakarta, 1990.
- Keputusan BPK.RI Nomor 17/K/I-XII-2/12/2008 tanggal 24 Desember 2008 tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Investigatif atas Indikasi Tindak Pidana Korupsi yang mengakibatkan Kerugian Negara/Daerah, 2008.
- Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung, 1997.
- Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*, PT.Citra Aditya Bakti Bandung, 2007.

- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali: Edisi Kedua*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Manafe, A. L, *Analisis Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi pada Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta No.14/PID.SUS-TPK/2014/PN.Yyk*. Tesis Magister Akuntansi. Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2016.
- Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi)*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1993.
- Martiman Prodjohamidjojo, *Komentar atas KUHAP: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Pradnya Paramitha, 1984.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta : Rineka Cipta, 2008.
- Muhammadiyah, *Nahdatul ulama Partnershipkemitraan, Koruptor itu kafir*, Mizan, Jakarta, 2010.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995.
- Muttaqi, Nabila Ihza Nur. *Reformulasi Penetapan Sanksi Pidana Denda Dalam Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Perspektif Economic Analysis Of Law*. Diss. Universitas Islam Indonesia, 2024.
- Nyoman Serikat Putra Jaya, *Beberapa Pemikiran Ke Arah Perkembangan Hukum Pidana*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2008).
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1997.
- Pangaribuan, Nalom. *Analisis Penerapan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara berdasarkan Kepastian Hukum sebagai Salah Satu Syarat Terpenuhinya Unsur Tindak Pidana Korupsi*. Diss. Universitas Kristen Indonesia, 2024.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008.

- R. Soesilo “*Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP)*”, Cipta Karya, Bogor, 1995.
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, Citra Pustaka, Bandung, 2020.
- Riadhussyah, Peranan BPKP Menghitung Kerugian Keuangan Negara Dalam Rangka Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi, Fakultas Hukum, Universitas Mataram, 2014.
- Ronny Hanitijo, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994.
- Satjipto Raharjo. Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis. Genta Publishing. Yogyakarta. 2009.
- Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, Bandung: PT.Al-Ma’arif. 2001.
- Setiawan Budi Utomo, Fiqih Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer, Gema Press Insani, Jakarta, 2003.
- Soerjono dan Abdurahman, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003.
- Soerjono Soekanto. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum. Raja Grafindo. Jakarta. 1983.
- Sudarsono, Kamus Hukum, Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta : Liberty, 2001.
- Sudikno Mertokusumo. Mengenal Hukum. Liberty Yogyakarta. Yogyakarta. 1999.
- Theodorus M. Tuanakotta, Menghitung Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Penerbit Salemba Empat, 2009.
- Wirjono Prodjodikoro, Perbuatan Melanggar Hukum, Vorkink-Von Hoeve, Bandung, 2013.

Jurnal

- Anggareksa, Krisna. *Tinjauan Hukum Tentang Hasil Penghitungan Kerugian Negara Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*. Diss. Universitas Islam Kalimantan Mab, 2022.
- Aryatmaja, I. Kadek, I. Nyoman Gede Sugiarta, and I. Made Minggu Widyantara. "Kedudukan Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti Dalam Penyelesaian

- Perkara Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Tipikor." *Jurnal Interpretasi Hukum* 4.1 (2023): 14-19.
- Asrianto Zainal. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan". *Jurnal Hasil Penelitian*. Vol. 11, No. 2, November 2016. Kendari: Institut Agama Islam Negeri.
- Darmadi, AA Sagung Mas Yudiantari. "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Bersyarat." *Jurnal Advokasi* 8.2 (2018).
- Fatah, A., Jaya, N. S. P., & Juliani, H. (2016). Kajian Yuridis Penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negara dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi. *Diponegoro Law Journal*, 6(1), 1-15.
- Fatah, A., Jaya, N. S. P., & Juliani, H. (2016). Kajian Yuridis Penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negara dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi. *Diponegoro Law Journal*, 6(1), 1-15.
- Gress Gustina Adrian Pah, Echwan Iriyanto, Laely Wulandari. "Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana Oleh Hakim dalam Tindak Pidana Korupsi". *Jurnal Lentera Hukum*. Vol. 1, No.1, April 2014. Jember: Universitas Jember.
- Kautsar, Ahmad Aldi. *Kekuatan Hukum Alat Bukti Penyadapan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Diss. Universitas Islam Kalimantan Mab, 2023.
- Mawey, Andre G. "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum." *Lex Crimen* 5.2 (2016).
- Ramadhan, Dinul, And Yunus Idy. "Analisis Yuridis Terhadap Pengembalian Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Kota Makassar (Studi Kasus Putusan Pn Makassar Nomor 119/Pid. Sus-Tpk/2023/Pn Mks)." *Jurnal Kajian Eksekusi Madani Indonesia Hukum* 1.4 (2024): 344-355.
- Siregar, Fitria Ramadhani, and Nanang Tomi Sitorus. "Analisis Hukum Terhadap Pertimbangan Hakim Atas Vonis Nihil Kepada Pelaku Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 9.2 (2022): 200-206.

Yenni Wiranti dan Ridwan Arifin. “Tantangan dan Permasalahan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia”. Jurnal Kosmik Hukum. Vol. 20, No.1. Purwokerto: Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 2020.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014

Putusan Praperadilan No. 19/Pid.Pra/2022/PN Mks

Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tte

Putusan Praperadilan Nomor 4 Pid.Pra/2024/PN.Tar

Putusan Praperadilan Nomor 113/Pid.Pra/2024/PN Jkt.Sel

SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 4 Tahun 2016 berisi tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan

Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang-undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru).

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi